



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah	Rp. 1.737.421.732.282,00
(2) Belanja Daerah	<u>Rp. 1.700.556.057.754,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 36.865.674.528,00
(3) Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 36.865.674.528,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 36.865.674.528,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.737.421.732.282,00 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pandapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah	Rp. 96.681.765.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 10.414.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Rp. 10.800.000.000,00
d. Lain-Lain PAD yang sah	<u>Rp. 48.000.000.000,00</u>
	Rp. 165.895.765.000,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat	Rp. 1.474.048.760.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>Rp. 75.194.379.310,00</u>
	Rp. 1.549.243.139.310,00

Pasal 6

Lain-Lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebagai berikut :

Lain-Lain Pendapatan Daerah

yang sah

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Perundang- Undangan	<u>Rp. 22.282.827.972,00</u>
	Rp. 22.282.827.972,00

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.700.556.057.754,00 , yang terdiri atas :

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebagai berikut :

Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai	Rp. 657.993.570.842,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 423.303.385.613,00
c. Belanja Bunga	Rp. 7.661.121.000,00
d. Belanja Hibah	Rp. 110.712.134.131,00
e. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 3.780.000.000,00</u>
	Rp. 1.203.450.211.586,00

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebagai berikut :

Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah	Rp. 9.600.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 68.194.651.837,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 3.777.347.100,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 79.562.336.411,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp. 1.556.102.070,00</u>
	Rp. 162.690.437.418,00

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebagai berikut :

Belanja Tidak Terduga	Rp.	36.609.965.650,00
-----------------------	-----	-------------------

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebagai berikut :

Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	10.709.576.500,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	<u>287.095.866.600,00</u>
	Rp.	297.805.443.100,00

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 36.865.674.528,00 yang terdiri atas pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebagai berikut :

Pengeluaran pembiayaan

Pembayaran Cicilan Pokok

Utang yang Jatuh Tempo	Rp.	36.865.674.528,00
------------------------	-----	-------------------

Pasal 14

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan adanya surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah, surplus anggaran pendapatan tersebut dianggarkan untuk pembayaran pokok hutang.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran 1 | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| 7. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 8. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah |

Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati Serdang Bedagai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023

NOMOR 70



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.895.765.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	96.681.765.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	405.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	405.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	405.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.235.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.235.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.235.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.720.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.720.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.720.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.800.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	36.192.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	36.192.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	36.192.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	459.800.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	459.800.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	459.800.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.467.700.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	6.467.700.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	6.467.700.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.568.300.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.568.300.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.568.300.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.226.615.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	30.226.615.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	30.226.615.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.567.350.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	9.039.585.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	9.039.585.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.527.765.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.527.765.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.414.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.080.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.880.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.880.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.198.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	278.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	6.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	72.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	800.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	800.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	20.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	20.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.100.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.100.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.136.000.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	30.000.000,00
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	30.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.088.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.088.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.800.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.800.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.800.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.800.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.000.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	6.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.000.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	6.500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.950.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.950.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.950.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	3.050.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.950.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.950.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	30.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	30.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	30.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.549.243.139.310,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.048.760.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.263.218.733.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	49.192.872.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	25.663.874.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.816.282.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	10.429.476.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	70.732.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.596.420.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	83.381.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.532.707.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	857.654.425.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	621.048.110.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	77.315.121.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	102.533.341.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	45.915.726.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	9.642.127.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	124.659.400.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	353.611.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	35.592.148.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.468.444.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	472.065.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.015.646.000,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	99.997.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	40.949.786.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	12.109.320.000,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	22.733.160.000,00
4.2.01.01.03.0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	1.015.646.000,00
4.2.01.01.03.0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama	1.849.577.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	231.712.036.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	94.927.492.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.996.982.000,00
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	9.084.029.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.247.241.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	5.397.700.000,00
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	135.000.000,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	5.540.400.000,00
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	101.172.458.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	5.210.734.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	204.142.649.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	204.142.649.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	204.142.649.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.687.378.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	6.687.378.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	6.687.378.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.194.379.310,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	75.194.379.310,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	75.194.379.310,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.428.644.452,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.923.945.450,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.894.006.254,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	298.427.208,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.649.355.946,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.282.827.972,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.282.827.972,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	22.282.827.972,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	22.282.827.972,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	22.282.827.972,00
	Jumlah Pendapatan	1.737.421.732.282,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.203.450.211.586,00
5.1.01	Belanja Pegawai	657.993.570.842,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	425.751.954.206,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	311.598.626.977,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	246.088.118.492,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	65.510.508.485,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.892.996.766,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.173.859.686,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.719.137.080,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.285.752.121,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.285.752.121,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.093.197.446,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.927.402.358,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.165.795.088,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.727.041.780,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.727.041.780,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.441.383.585,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.817.877.406,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.623.506.179,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	914.841.484,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	914.841.484,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	724.293.748,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.070.268,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	716.223.480,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.350.098.297,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	34.031.696.529,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.318.401.768,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	710.544.323,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	645.154.943,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	65.389.380,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.013.177.679,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.817.018.139,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	196.159.540,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	185.224.642.522,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	185.224.642.522,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	185.224.642.522,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	23.604.329.531,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.172.166.965,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	15.187.500,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	158.812.500,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	64.500.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	67.500.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.357.200.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	17.242.500,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	242.538.750,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	58.811.250,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	680.098.840,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	508.775.625,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	441.300.000,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	108.000.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65.625.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	30.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	10.425.000,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	750.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	116.250.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.275.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	78.300.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	675.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	13.738.002.566,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	13.738.002.566,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.246.860.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.793.160.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.240.700.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	213.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	6.000.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	6.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.823.710.994,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.069.784.620,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.069.784.620,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	107.129.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	107.129.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	132.456.180,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	132.456.180,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.638.050,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.638.050,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.014.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.014.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.044.288,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.044.288,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.164.271.056,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	88.009.488,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.068.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.134.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.134.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	450.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	450.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	736.933.589,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.638.231,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.638.231,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	470.321,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	470.321,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	9.576.648,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	9.576.648,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.484,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.484,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	483.408.825,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.025.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	21.175.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	8.600.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9.000.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	180.960.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.299.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	32.338.500,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	200.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.841.500,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	151.133.075,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	67.836.750,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	58.670.000,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	14.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.750.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	4.000.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.390.000,00
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	100.000,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.500.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	10.440.000,00
5.1.01.05.11.0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	90.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.303.385.613,00
5.1.02.01	Belanja Barang	105.074.753.171,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	104.874.753.171,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	739.656.927,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	563.177.545,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.827.931.899,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	23.500.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	355.873.400,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	67.281.359,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	90.040.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.755.819.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	105.826.800,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	206.356.790,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	916.901.580,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	259.518.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.377.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.150.000,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	30.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	450.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.667.121.850,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	634.675.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.871.723.164,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	254.904.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.196.745.930,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.481.397.472,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	733.083.559,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	863.881.822,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	123.900.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	289.640.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	164.380.200,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.432.806.890,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	30.811.959.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.904.717.798,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	175.403.088,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.392.045.200,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	300.352.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.862.338.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.333.296.520,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.028.116.378,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	95.400.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.309.800,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.663.181.500,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	786.825.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.600.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.200.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	99.200.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	28.800.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	34.560.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	21.384.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	74.400.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	364.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	174.544.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	200.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	115.820.017.158,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	85.571.181.511,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.761.769.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.547.768.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	196.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	56.260.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	78.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	331.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.048.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.160.393.969,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	602.700.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.122.800.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	559.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	203.190.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.442.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	21.403.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.082.117.628,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.615.514.828,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	392.700.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	396.573.936,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	94.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	122.400.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	741.200.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	378.460.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	290.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	129.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	176.910.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	162.435.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	54.850.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.577.113.685,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	240.369.541,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.989.281.184,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	10.084.350,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	30.600.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	393.510.390,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	80.080.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.717.360.800,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.331.196.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.164.800,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	378.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	3.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.236.548.850,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	180.000.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	633.875.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.237.856.400,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.019.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	441.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	124.150.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.495.967.450,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	104.500.000,00
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.049.343.068,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	458.500.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	140.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	664.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	76.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4.657.745.668,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	53.097.400,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.857.628.464,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.200.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	21.900.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	75.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	444.134.864,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	3.241.593.600,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	800.000.000,00
5.1.02.02.08.0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	75.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	805.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	565.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	240.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	132.400.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	132.400.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.180.812.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.624.812.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	556.000.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.178.512.465,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.037.500,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	31.762.500,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	12.900.000,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	13.500.000,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	271.440.000,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.448.500,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	48.507.750,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.762.250,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	680.098.840,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	101.755.125,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	88.230.000,00
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	21.600.000,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.000.000,00
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.125.000,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	6.000.000,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.085.000,00
5.1.02.02.14.0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	150.000,00
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.250.000,00
5.1.02.02.14.0028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	225.000,00
5.1.02.02.14.0031	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	15.660.000,00
5.1.02.02.14.0032	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	135.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	54.648.508.126,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	31.800.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	31.800.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.881.892.850,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	72.816.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	177.210.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	88.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.746.650.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	622.890.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	197.050.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.900.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	857.880.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	34.551.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	39.551.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	274.350.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	291.508.200,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	362.720.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	603.043.000,00
5.1.02.03.02.0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2.200.000,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	9.725.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	400.370.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	15.478.650,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.695.495.276,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	29.645.295.276,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.685.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	160.200.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	105.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.009.320.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.000.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	11.589.320.000,00
5.1.02.03.04.0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	100.000.000,00
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	140.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	180.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	30.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.829.148.460,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.629.148.460,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.826.779.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.145.226.460,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	657.143.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	200.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.810.358.698,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.199.216.850,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.073.216.850,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	45.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	561.000.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	21.520.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.611.141.848,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	242.345.248,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	18.368.796.600,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.120.600.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.120.600.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.120.600.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.000.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.000.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.000.000.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.661.121.000,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	7.661.121.000,00
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	7.661.121.000,00
5.1.03.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	7.661.121.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	110.712.134.131,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.711.105.621,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	36.641.105.621,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	36.641.105.621,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	70.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	70.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	72.485.100.010,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	63.842.400.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	63.842.400.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.642.700.010,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.642.700.010,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.515.928.500,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.515.928.500,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.515.928.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.780.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.780.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.780.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.780.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	162.690.437.418,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.600.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	9.600.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	9.600.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	9.600.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.194.651.837,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.408.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	186.000.000,00
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	186.000.000,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	1.200.000.000,00
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	1.200.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	22.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	22.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	917.792.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	917.792.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	878.913.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.879.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.754.238.865,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.071.673.760,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	22.120.280,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.049.553.480,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.631.568.105,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.273.073.365,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	984.285.440,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	346.575.800,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	27.633.500,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	50.997.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	16.930.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	34.067.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	121.065.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	9.065.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	9.065.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	12.000.000,00
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	12.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	100.000.000,00
5.2.02.06.03.0020	Belanja Modal Switcher/Menara Antena	100.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.614.175.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.840.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	11.840.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.602.335.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.602.335.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	212.990.300,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	29.500.000,00
5.2.02.08.04.0004	Belanja Modal Recorder Display	29.500.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	176.079.500,00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	176.079.500,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.110.800,00
5.2.02.08.08.0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	3.110.800,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	4.300.000,00
5.2.02.08.09.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat	4.300.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	52.003.280.922,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	51.413.597.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	800.463.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	50.613.134.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	589.683.922,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	177.511.984,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	412.171.938,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.163.109.750,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.163.109.750,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.163.109.750,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.000.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.000.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.777.347.100,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.777.347.100,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.777.347.100,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.250.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	780.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.040.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	507.347.100,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.562.336.411,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	62.085.546.411,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	59.485.546.411,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	57.338.516.411,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.147.030.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.600.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.600.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.628.790.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	845.500.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	845.500.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.783.290.000,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	436.000.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	157.290.000,00
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	5.190.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	10.848.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	10.848.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.848.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.556.102.070,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.532.102.070,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.532.102.070,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.527.602.070,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	4.500.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	24.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	24.000.000,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	24.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	36.609.965.650,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	36.609.965.650,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	36.609.965.650,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	36.609.965.650,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	36.609.965.650,00
5.4	BELANJA TRANSFER	297.805.443.100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.709.576.500,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.709.576.500,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.709.576.500,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.709.576.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	287.095.866.600,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	287.095.866.600,00
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	287.095.866.600,00
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	287.095.866.600,00
	Jumlah Belanja	1.700.556.057.754,00
	Total Surplus/(Defisit)	36.865.674.528,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.865.674.528,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.865.674.528,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	36.865.674.528,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	36.865.674.528,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	36.865.674.528,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.865.674.528,00
	Pembiayaan Netto	-36.865.674.528,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Bupati Serdang Bedagai

